DINAMIKA adalah analisis enam-bulanan kondisi perburuhan di Indonesia yang didasarkan pada kliping koran dan majalah (Kompas, Bisnis Indonesia, The Jakarta Post, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Koran Tempo, Republika, Pikiran Rakyat, Jawa Pos, Bernas, Tempo, Gatra, Tempo Interaktif), *serta beberapa buletin dan majalah perburuhan. Analisis ini terutama menyoroti dua aspek dalam isu perburuhan, yaitu resistensi buruh dan peluang pembangunan gerakan buruh dalam upaya memahami kondisi perburuhan untuk penguatan gerakan buruh.*

DINAMIKA

DINAMIKA PERBURUHAN INDONESIA
SEMESTER II, 2004

L I P S
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane

Secara umum, kondisi perburuhan di Indonesia sampai saat ini masih harus menghadapi masalah yang serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Angka pengangguran masih terus bergerak naik. Jika pada tahun 1997 jumlah pengangguran mencapai 5,4 persen, di tahun 2004 naik hingga 10,8 persen. Dengan memasukkan kategori pengangguran tersembunyi, yakni mereka yang setengah menganggur, angka pengangguran mencapai lebih dari 40 juta.

Ironisnya, pengangguran yang menimpa tenaga kerja muda dan perempuan juga merangkak naik. Sekitar tiga dari sepuluh angkatan kerja berusia 15 hingga 24 tahun adalah penganggur. Kelompok muda penganggur ini mencapai dua pertiga dari total pengangguran yang ada (26,7 juta jiwa). Berdasarkan jenis kelamin, angka perempuan penganggur lebih besar dibanding dengan penganggur laki-laki. Proporsi yang tumbuh dari perempuan penganggur ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menyerap lulusan perguruan tinggi dan mereka yang telah tamat sekolah. Tingkat pendidikan formal dan keterampilan yang rendah menjadi sebagian dari masalah, karena sekitar 55 persen angakatan kerja adalah lulusan sekolah dasar kebawah.

Pada tahun 2005, pemerintah menjanjikan akan menyerap 2 juta tenaga kerja bila target pertumbuhan bisa mencapai 5,5 persen. Namun angkatan kerja yang baru setiap tahun tumbuh lebih dari 2,5 juta. Bagaimanpun, pemerintah tampak terjebak pada mitos bahwa pertumbuhan ekonomi selalu menjadi obat mujarab bagi masalah sosial-ekonomi, termasuk pengangguran dan kemiskinan.

Meningkatnya Pengangguran dan Informalisasi Kerja

Tabel 1 di bawah ini menunjukan bahwa angka pengangguran masih akan terus meningkat, tampak dari perkiraan peningkatan penduduk usia kerja yang tidak terserap lapangan kerja dalam rentang tahun 2003 hingga 2009. Seperti disebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009, pemerintah secara bertahap akan memindahkan buruh informal ke lapangan kerja formal. Penciptaan lapangan kerja formal ini akan diupayakan melalui industri padat karya (*labour intensive*), industri kecil

dan menengah, serta industri yang berorientasi ekspor. Prioritas kerja ini sebetulnya sudah pernah diprogramkan oleh pemerintah sebelumnya, namun tampaknya belum banyak mengalami kemajuan.

Tabel 1
Perkiraan Penduduk, Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk Bekerja dan Penganggur 2003-2009

URAIAN	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Total Penduduk (ribu jiwa)	213.734	216.372	219.010	221.496	223.962	226.468	226.954
Penduduk Usia Kerja (ribu jiwa)	151.936	154.858	157.780	160.550	163.320	166.090	168.880
Angkatan Kerja (ribu jiwa)	103.416	105.678	107.940	110.064	112.228	114.372	116.516
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,02	4,43	5,01	5,29	5,91	6,50	7,14

Sumber: Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, dikeluarkan oleh Depnakertrans

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi saat ini pun justru menciptakan ketimpangan karena hanya sekelompok kecil saja yang memiliki akses terhadap modal yang lebih tinggi dan yang kelak memperoleh keuntungan (*return*) yang lebih besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi sekarang ini telah memiliki andil terhadap penurunan perluasan kesempatan kerja.

Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih banyak didominasi oleh sektor konsumsi sebagai pendukung bangkitnya sektor perdagangan. Dampaknya tentu buruk bagi struktur tenaga kerja di mana tenaga kerja lebih banyak berpindah ke sektor informal. Tenaga kerja sektor informal harus dipahami sangat rentan untuk turun kelas menjadi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Proses informalisasi kerja, yakni tumbuhnya aktivitas penciptaan pendapatan di luar segala dimensi kelembagaan formal dan intervensi negara, juga terjadi secara disengaja dilakukan pengusaha untuk menambah keuntungan mereka. Menginformalkan buruh ialah menguntungkan pengusaha karena kewajiban mereka terhadap kesejahteraan buruh sangat berkurang. Informalisasi ini tampak semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada kurun waktu 1996-1998, rata-rata laju informalisasi di Indonesia mencapai 1,40 persen, dan pada 2002-2003 kesempatan kerja di sektor formal mengalami penurunan hingga 1,3 juta. Saat ini lebih dari 70 persen angkatan kerja Indonesia berada di sektor informal. Dorongan informalisasi semakin membesar, seperti terjadi di industri tekstil dan produk tekstil, karena industri ini sebagaimana juga beberapa industri lain di Indonesia lebih banyak mengandalkan upah murah dalam meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

PHK yang Tak Terkendali

Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi beberapa tahun terakhir memperburuk kondisi perburuhan saat ini. PHK tersebut biasanya dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Pemerintah sendiri mengakui bahwa mereka menemukan banyak perusahaan yang melakukan PHK sepihak tanpa prosedur hukum, tanpa mempedulikan nasib dan tanpa menghiraukan hak normatif buruh. Namun seperti yang sudah-sudah pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Menteri Tenaga Kerja hanya berapologi bahwa salah satu alasan pengusaha melakukan PHK adalah adanya ekonomi

biaya tinggi dan berbagai regulasi baru di daerah yang menurunkan daya saing dan merugikan perusahaan. Perselisihan perburuhan daerah maupun pusat selama 2004 tercatat lebih dari 114.000 kasus.

Di Kalimantan Barat, PHK massal yang terjadi di lebih dari 22 perusahaan kayu hingga September 2004 menimpa sedikitnya 13.346 buruh. Pesangon dan hak normatif lain dalam proses PHK tersebut tak diterima para buruh, bahkan perusahaan tidak membayar upah buruh yang beberapa bulan sebelumnya tidak mereka terima. Hanya beberapa perusahaan yang mau bernegosiasi dengan buruh. Itupun berjalan alot dan tetap meminimalkan tuntutan buruh. Hal ini memaksa beberapa di antara mereka melakukan aksi mogok makan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan di Riau dan Kalimantan saja, dengan alasan terjadinya penurunan dalam kegiatan usaha, melakukan PHK terhadap lebih dari 50.000 buruh. Ditambah dengan yang terjadi di propinsi-propinsi lain, PHK di industri ini diperkirakan para pengusaha mencapai sekitar 500-600 ribu buruh.

Sementara itu di Batam kasus PHK pada periode Juli-Desember 2004 menimpa 4.500 buruh perusahaan Amerika, McDermott. Perusahaan yang bergerak di bidang industri pendukung usaha minyak dan gas lepas pantai itu beralasan bahwa usahanya tengah menurun dalam beberapa bulan terakhir hingga harus mem-PHK 90 persen jumlah buruhnya, dari 5.000 hingga hanya 500 saja. Sementara di Kabupaten Tangerang, sejak Januari-Oktober 2004 PHK mencapai angka 9.000 buruh, di mana pada 2003 PHK telah menimpa 10.500 buruh.

PHK juga menimpa ratusan ribu buruh garmen dan tekstil di berbagai wilayah. Asosiasi pengusaha industri ini bahkan mengklaim bahwa sektor tekstil dan garmen telah mem-PHK 1 juta lebih buruhnya akibat berakhirnya jatah kuota ekspor ke AS dan Uni Eropa. Di sektor lain, PHK menimpa ratusan buruh perhotelan (Kediri, Jawa Timur), ratusan buruh proyek vital di Aceh, ratusan buruh perusahaan Kimia di Bekasi, ratusan buruh perkebunan teh di Cianjur... Daftar ribuan buruh ter-PHK tentu masih panjang berderet.

Aksi dan Tuntutan Buruh

Fenomena PHK massal yang tidak adil mendapat respon beragam oleh buruh. Ada yang menolak sama sekali dengan alasan bertentangan dengan prosedur hukum, ada pula yang akhirnya menerima setelah perundingan alot, juga ada yang pasrah tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan PHK. PHK yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Bandung, 2003 lalu masih diprotes oleh ribuan buruh yang hingga kini masih menolaknya.

Pada semester II 2004, PHK menjadi isu yang banyak memicu aksi buruh. Grafik 1 berikut ini secara berurutan menunjukkan masalah PHK (*kategori hubungan kerja*) menempati angka tertinggi dalam daftar tuntutan dan protes buruh selama aksi, disusul tuntutan atas upah/tunjangan (*kategori kesejahteraan*) yang kerap tidak atau lambat diterima buruh. Di urutan ketiga, aksi dipicu oleh uang jaminan sosial yang sering tidak disetorkan pengusaha (biasanya pengusaha menggelapkan uang jaminan sosial tersebut). Sistem kerja dan status kerja (kontrak dan *outsourcing*) masing-masing menempati penyebab keempat dan kelima yang memicu aksi buruh. Sedangkan Undang-Undang perburuhan yang baru (UU No.13/2003, UU No.2/2004) serta pelanggaran kebebasan berserikat (*kategori hak politik*) masih kerap memicu aksi buruh, disamping intimidasi dan tekanan kepada mereka yang mencoba membangun dan melakukan kegiatan berserikat.

Grafik 1
Tuntutan dan Pemicu Aksi Buruh
(Juli-Desember 2004)
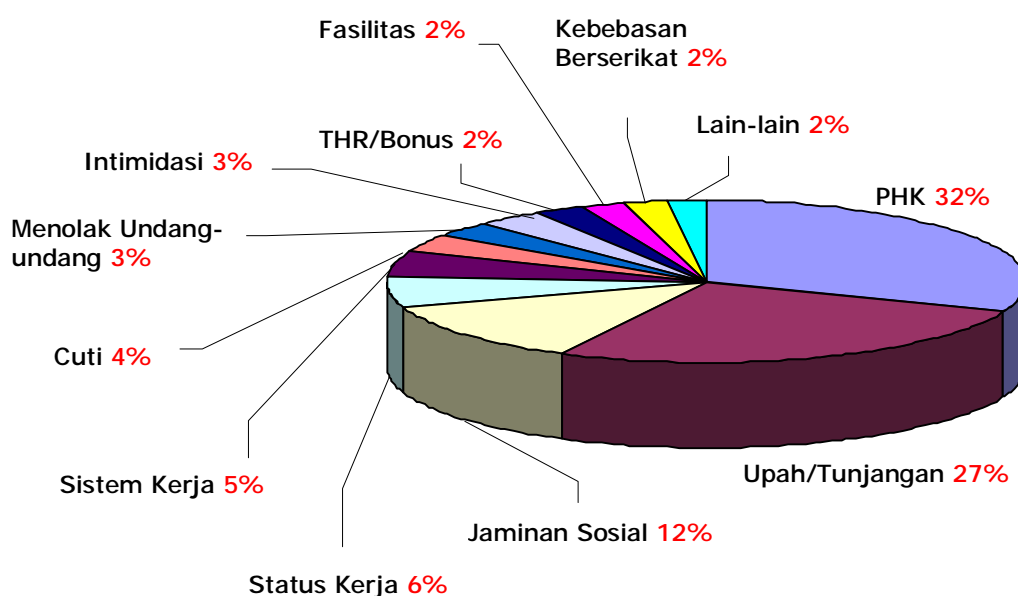
Sumber: Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS

Basis perlawanan buruh pada semester II 2004 terjadi sedikitnya sebanyak 100 kali dengan melibatkan 81.314 buruh (lihat tabel 2). Aksi kolektif dan aksi yang dilakukan atas nama serikat buruh pada semester ini sedikit meningkat, terutama yang terjadi di bulan Desember. Meski aliansi antarserikat kebanyakan belum bersifat strategis, tetapi fenomena ini merupakan langkah maju. Di Bandung, dalam memprotes kebijakan upah minimum, Forum Solidaritas Buruh Cimahi berdemonstrasi selama 4 kali dengan melibatkan 2000 buruh. Koalisi Buruh Bandung Raya dan Aliansi Rakyat Bersatu Jawa Barat-Banten adalah aliansi lain yang terjadi di Bandung. Sementara itu di Jakarta aliansi antarserikat tergabung dalam Aliansi Buruh Bersatu ABB).

Tabel 2
Basis Aksi dan Keterlibatan Buruh dalam Aksi
Semester II (Juli-Desember) 2004

SEKTOR	Juli		Agustus		September		Oktober		November		Desember		JUMLAH	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Manufaktur	7	7,300	9	4,260	13	16,428	13	10,200	3	2,850	3	1,535	47	42,573
Pertambangan dan kimia							1	214			2	250	3	464
Transportasi & Komunikasi	4	650	2	250	2	1,050	3	280	1	150	1	150	13	2,530
Listrik, Air & Gas													-	-
Keuangan													-	-
Pertanian & Perkebunan	1	150			1	150			1	50			3	350
Perdagangan umum & Jasa			2	400			4	687	1	60			7	1,147
Aliansi/Serikat Buruh	1	50	2	2,150	5	4,550	3	6,150	3	250	13	21,100	27	34,250
												TOTAL	100	81,314

Keterangan: A = Frekuensi aksi; B = keterlibatan buruh dalam aksi.
(Sumber: Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS)

Umumnya, aksi yang dilakukan aliansi serikat buruh ini ialah memprotes kebijakan upah minimum di wilayah masing-masing dan juga aksi menolak PHK massal, sepeti dilakukan Aliansi Tolak PHK (ATP). Aksi ATP melibatkan belasan elemen organisasi buruh dan dukungan tak kurang dari 2.500 buruh ter-PHK. Aliansi serikat buruh tekstil dan garmen yang menjadi korban PHK massal tersebut mewakili sedikitnya 15 ribu buruh di Jabotabek yang ter-PHK tanpa kompensasi.

ATP ini menggelar demonstrasinya sambil menginap di depan gedung Depnakertrans selama dua minggu. Selain di Depnakertrans, berturut-turut mereka melakukan jalan jauh (*longmarch*) menuju Departemen Keuangan, kantor pusat Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), Kedutaan Besar Republik Korea dan Bursa Efek Jakarta. Tuntutan mereka meliputi (1) menolak PHK massal, (2) menolak campur tangan militer dan preman dalam perselisihan perburuhan, (3) menolak sitem kerja kontrak, (4) menuntut subsidi bagi yang ter-PHK, dan (5) menuntut dicabutnya UU No.13/2003 dan No.2/2004. Dalam melakukan aksinya, ATP sempat mendapatkan teror berupa surat panggilan dari kepolisian sektor Jakarta Selatan dan dianggap melakukan pelanggaran UU No.9/1998 tentang kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum.

Beberapa aliansi lain juga melakukan aksi di berbagai daerah, seperti di Tangerang (Komite Buruh Cisadane), Sukoharjo (Serikat Pekerja Sukoharjo), Sidoarjo (Forum Perjuangan Buruh Sidoarjo), dll. Sempat juga terjadi aliansi antara serikat buruh, pengusaha dan akativis buruh migran yang melakukan protes di halaman kantor DPR Pusat atas rencana pengesahan RUU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan RUU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKLN).

Pilihan Lokasi Aksi dan Kekerasan Aparat

Lokasi yang menjadi pilihan buruh dalam aksi selama semester II 2004 lebih banyak dilakukan di gedung MPR/DPR, lalu kedua perusahaan, dan ketiga kantor pemerintah. Tidak sedikit juga yang melakukan aksi di kantor Komnas HAM, istana, pengadilan, bahkan jalan raya, seperti dilakukan para buruh PT DI dengan alasan di antaranya adanya ancaman sekelompok preman yang dibayar pengusaha.

Intimidasi dan kekerarasan yang dilakukan preman serta aparat kepolisian masih terus terjadi. Pada Agustus hingga September 2004, aksi kekerasan preman dan aparat kepolisian menimpa para buruh PT. Shamrock Manufacturing Corpora di Deli Serdang, Sumatera Utara. Demonstrasi ribuan buruh perusahaan sarung tangan karet berlabel Shamrock itu bermula dari kasus PHK atas 14 buruh yang hendak mendirikan serikat (Serikat Buruh Medan Independen/SBMI) di luar serikat yang jinak dihadapan pengusaha. Kesewenang-wenangan ini memunculkan aksi spontan selama dua bulan oleh ribuan buruh yang tergabung dalam SBMI atas pelanggaran hak-hak buruh yang selama ini terjadi. Aksi ini juga melibatkan ribuan buruh PT Medan Tropical Canning dengan kasus yang sama.

Seperti dilaporkan Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), Medan, pelanggaran yang dirasakan para buruh selama ini meliputi kebebasan berorganisasi, PHK sepihak yang terus-menerus, skala upah yang tidak tetap, jaminan pelayanan kesehatan yang buruk, perlengkapan kerja yang tidak memadai, dan peraturan-peraturan perusahaan yang aneh seperti paksaan pengunduran diri dari bekerja bila menikah dengan sesama buruh di perusahaan. Belum lagi sistem target yang memeras keringat buruh serta "proyek *thank you*" yang terjadi di beberapa bagian tertentu yang dilakuakan di luar jam kerja. Isu aksi sempat berbelok menjadi kriminalisasi yang ditujukan pada beberapa buruh yang aktif mengikuti aksi. Sejumlah buruh sempat ditahan oleh Poltabes Kota Medan dan beberapa orang lainnya menjadi tersangka dengan tuduhan mengada-ngada, yaitu

perampasan roti. Aksi kerap kali diwarnai dengan bentrokan dengan aparat/preman dan adu domba di antara para buruh oleh pengusaha dengan memperhadapkan para buruh yang tengah aksi dengan serikat buruh yang loyal terhadap pengusaha (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/SPSI).

Dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2003 lalu, resistensi buruh selama 2004 mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari jumlah aksi maupun keterlibatan buruhnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2002, jumlah aksi menurun tipis, namun keterlibatan buruhnya meningkat hingga 30 ribu lebih. Resistensi serikat buruh dan keterlibatan buruh dalam aksi selama 1999-2004 mengalami fluktuasi, di mana aksi buruh terbanyak terjadi pada tahun 2001 (357 aksi), sementara keterlibatan buruh dalam aksi terbanyak pada tahun 2000 (730.922 buruh) (lihat Grafik 2).

Grafik 2
Basis Aksi dan Keterlibatan Buruh dalam Aksi, 1999-2004
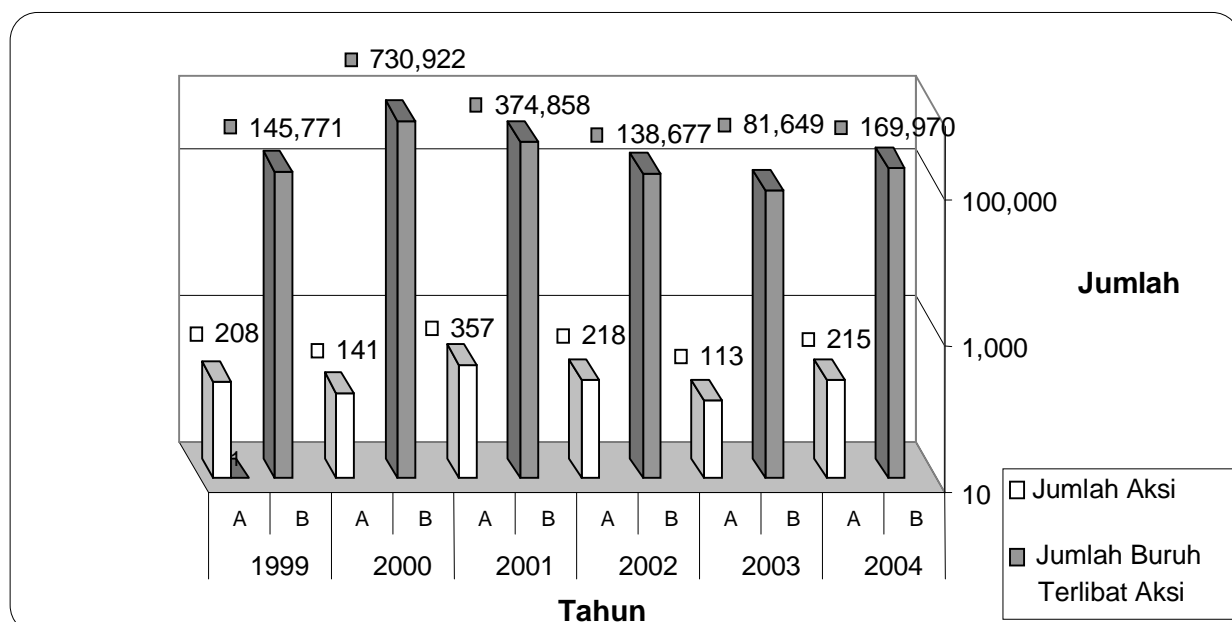
Keterangan: A = Frekuensi aksi; B = keterlibatan buruh dalam aksi.
(Sumber: Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS)

Catatan

Ada hal mendesak yang mesti dilakukan serikat buruh untuk menyikapi dinamika perburuhan ke depan, yaitu perlunya model pengorganisasian yang sesuai dengan kecenderungan perburuhan saat ini. Model tradisional yang mengandalkan basis buruh (formal) di suatu perusahaan dan atau di suatu sektor (industri) tampak tidak lagi efektif karena kecenderungan sistem kerja yang berubah dan informalisasi kerja yang massif.

Banyak gagasan yang perlu dikembangkan mengenai pencarian pola pengorganisasian saat ini, di antaranya pengorganisasian buruh yang berbasis masyarakat atau komuniti, atau juga pengorganisasian buruh yang melibatkan mereka yang bekerja di sektor informal. Serikat buruh yang abai atas pembaruan model pengorganisasian ini akan menghadapi kendala besar dalam kerja-kerja mereka. Selain itu, perlu juga mencari pendekatan pengorganisasian yang dapat menghindari modus "adu domba" yang

dilakukan pengusaha maupun aparat, serta yang dapat mencegah kekerasan dan intimidasi oleh mereka.

Bagaimanapun, masalah pengorganisasian buruh harus direfleksikan bahwa ia juga terkait dengan upaya penyadaran politik buruh. Kesadaran politik inilah yang kelak akan mendorong buruh berpartisipasi dalam kerja-kerja seikat. Tentu menjadi tantangan setiap pengurus serikat buruh saat ini untuk memperbesar ruang partisipasi dan mendorong buruh untuk ikut berperan dalam kerja-kerja serikat. Hal yang terpenting, aliansi yang sudah dibangun mesti dijaga dan terus dijalin. Kerja sama antarserikat buruh penting dilakukan. Dengan kerja sama, bahu-membahu dan terus mengembangkan kapasitasnya, buruh akan memperoleh apa yang menjadi haknya.***

L I P S
Lembaga Informasi Perburuhan Sedane
Sedane Institute for Labour Information
Jl. Dewi Sartika No.52F Bogor 16121
West Java, Indonesia
Ph/Facs.: +62-251-344473
Email: lips@lips.or.id
http//:www.lips.or.id